

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejati adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.¹

Dalam UUD 1945 Pasal 27 dan 28 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).² Selain itu penyandang disabilitas juga berhak dalam mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Selain itu, kewarganegaraan yang ada pada diri mereka pun harus lebih diperjelas. Umumnya, kewargaan dikaitkan dengan klaim atas hak-hak dasar bagi warga negara.

¹Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm.1.

²<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses Rabu 2 mei 2018 Pukul 20:15.

Tekanannya bukan pada keberadaan hak-hak dasar sebagai sesuatu yang tak terelakkan, bersifat alamiah dan normatif, dan karenanya berbeda dengan hak asasi manusia.³

Adapun hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya kita ketahui, sebagai berikut: hak penyandang disabilitas secara umum meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak kesejahteraan sosial, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, dan sebagainya.⁴ Dari banyaknya hak-hak di atas, yang penulis bahas adalah tentang hak politik bagi penyandang disabilitas karena dalam hak politik tersebut mereka bisa memberikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia.

Hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), Hak politik adalah hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah negara atau memerintahnya.⁵ Akan tetapi, tidak semua individu dapat mengakses hak politiknya secara penuh, seperti penyandang disabilitas yang masih sulit dalam memperoleh hak politiknya. Adanya hak-hak politik bagi penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan adanya

³Erie Hiariej, dkk, “*Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Representasi*”, Yogyakarta. Jurnal (Yogyakarta: Penerbit PolGov), hlm.4.

⁴<https://lingkarsosial.wordpress.com/2017/06/20/difabel-wajib-tahu-inilah-hak-hak-penyandang-disabilitas-sebarkan>, diakses Kamis 10 mei 2018 Pukul 10:25.

⁵Choirun Nisa, “*Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Lampung. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 15

ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan instrument hukum (*law making*) dan penegakkannya (*law enforcing*).

Berkaitan dengan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas belumlah secara maksimal mendapat peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.⁶ Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan setiap warga negara memiliki perlakuan yang sama, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Dalam tercapainya pemenuhan hak penyandang disabilitas, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta demokrasi mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat kemudian seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Person With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan

⁶Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm.3.

⁷http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf, diakses Senin 7 mei 2018 Pukul 13:25.

yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.⁸ Dari ke tiga Undang-Undang di atas yang ditetapkan pemerintah hingga saat ini ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga tingkat internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.⁹ Dengan adanya poin-poin di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, seharusnya penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak politiknya secara penuh dan secara maksimal.

Akan tetapi, hampir semua penyandang disabilitas di Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak politiknya sebagai warga Negara, dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU, tidak semua daerah di Indonesia sudah memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas, seperti menyediakan alat bantu kertas suara huruf braille saat penyelenggaraan pemilu di setiap TPS dan tidak disediakannya jalan khusus pengguna kursi roda hingga bentuk bilik suara yang membuat tidak nyaman. Menyediakan

⁸Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm.2.

⁹http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf, diakses Kamis 10 mei 2018 Pukul 20:15.

penerjemah untuk tuna rungu, dan menyediakan guru khusus untuk penyandang autisme agar para disabilitas dapat terbantu untuk mendapatkan hak politiknya dalam pendidikan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari rangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas.¹⁰

Bryan Turner dan Michael Mann menegaskan bahwa kewargaan perlu selalu dipahami dalam konteks politik kewargaan. Turner menyimpulkan, formasi kewargaan dibedakan menjadi proses-proses yang sangat menekankan pengakuan dan perlindungan hak-hak kewargaan di wilayah publik di satu sisi, dan proses yang serupa di wilayah privat disisi lainnya, yang berkaitan dengan isu-isu identitas kultural.¹¹ Menurut Mann, perjuangan terhadap hak-hak kewargaan akan terus ada dan menjadi faktor penentu penting perkembangan kewargaan dari masa ke masa.¹² Selain itu, kewarganegaraan yang ada pada diri setiap individu harus lebih diperjelas. Karena pada umumnya kewarganegaraan yang melekat pada setiap individu dikaitkan dengan klaim atas hak-hak dasar sebagai warga negara.

Di dalam penelitian ini, penulis memilih penyandang disabilitas dalam kategori tuna rungu. Tuna Rungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena kerusakan atau kehilangan kemampuan mendengar

¹⁰Mugi Riskiana Halalia, *“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”*, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm.3.

¹¹Eric Hiarij, dkk, *“Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Representasi”*, Yogyakarta. Jurnal (Yogyakarta: Penerbit PolGov), hlm.8.

¹²*Ibid*, hlm.9.

sedangkan remaja tuna rungu adalah seseorang dengan batasan usia antara 12 hingga 21 tahun yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar.¹³

Penulis melakukan studi kasus pada Tuna Rungu dan subjek yang penulis pilih untuk melengkapi penelitian yang penulis tulis adalah organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) yang ada di Kota Palembang. Organisasi ini juga merupakan organisasi resmi yang dibentuk pertama kali di Jakarta dan berkembang sampai ke Provinsi Sumatera terutama Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang.

Organisasi Gerkatin menjadi wadah bagi penyandang disabilitas dalam kategori tuna rungu untuk mengekspresikan diri, bersosialisasi dan memberikan pendapat dalam bermusyawarah ke sesama tuna rungu. Peran organisasi Gerkatin sangat membantu para tuna rungu dalam mengapresiasi keinginannya dan mewujudkan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, serta membangun semangat bagi para tuna rungu dalam dirinya. Dalam meningkatkan hubungan masyarakat antara tuna rungu dari masyarakat lainnya maka di bentuklah organisasi Gerkatin ini. Dan juga organisasi ini telah berdiri di berbagai provinsi maupun kota yang ada di Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk membuat kesetaraan antara masyarakat biasa dengan masyarakat penyandang disabilitas itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah membuat aturan-aturan yang memang bisa di legalkan demi tercapainya kesetaraan atau pemenuhan kebutuhan dari masyarakat disabilitas. Dalam prosesnya dari sejak tahun 2016, pemerintah berusaha untuk membuat undang-undang yang dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas, namun hingga saat ini undang-undang tersebut belum disahkan dengan berbagai alasan. Maka dari itu Undang-Undang Tentang

¹³Dian Rachmawati Wasito dan Dwi Sarwindah S, "*Penyesuaian Sosial Remaja Tuna Rungu yang Bersekolah di Sekolah Umum*", Surabaya. Jurnal (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, 3 Desember 2010), hlm.141.

Penyandang Disabilitas Tahun 2016 belum masuk dalam Peraturan Pemerintah atau yang disingkat menjadi PP.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam skripsi termasuk salah satu point yang sangat penting, karena diantaranya adalah mengidentifikasi. Identifikasi berarti mempelajari dan mengkaji tentang kasus yang akan diangkat dalam pembuatan karya ilmiah itu. Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti, setelah memperoleh dan menentukan topik penelitiannya adalah mengidentifikasi permasalahan yang hendak dipelajari. Identifikasi ini dimaksudkan sebagai penegasan batas-batas permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari tujuan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang Periode Tahun 2009-sekarang).
2. Hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
3. Memiliki kondisi kemampuan bicara yang tidak jelas membuat penyandang disabilitas (tuna rungu) tidak bisa mendapatkan hak politiknya secara penuh.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian diberlakukan adanya pembatasan dan perumusan masalah. Pada bagian ini merupakan bagian yang memberikan penjelasan tentang pembatasan dan perumusan masalah.

1. Batasan Masalah

Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti tidak terjerumus ke dalam banyak data yang ingin diteliti, sehingga cakupannya adalah dalam batasan penelitian yaitu tempat dan waktu perlu diperjelaskan.¹⁴

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Periodisasi dalam penelitian ini dimulai tahun 2009-sekarang.
- b. Penelitian ini dilakukan pada anggota organisasi Gerkatin penyandang tuna rungu di kantor organisasi Gerkatin Jalan MP Mangkunegara Kota Palembang.
- c. Fokus pada anggota organisasi Gerkatin penyandang tuna rungu untuk mendapatkan hak politiknya.

Pembahasan ini dimaksudkan agar peneliti membatasi ruang lingkup penelitiannya secara tegas dan jelas. Hingga dapat diketahui secara terperinci. Masalah yang akan diteliti menjadi sedemikian luas. Tetapi akan menjadi lebih jelas dan spesifik serta akan membantu penelitian mengarahkan sasaran kerjanya.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada obyek yang diteliti.¹⁵ Maka dari itu, dari uraian latar belakang masalah di atas yang menjadi pokok penelitian ini adalah “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)” dengan sub-sub permasalahan sebagai berikut:

¹⁴Dudug Abdurrahman, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm.126.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.290.

1. Apa saja kendala yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna rungu) untuk memperoleh hak politiknya secara penuh?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas (tuna rungu)?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi bagi penyandang disabilitas (tuna rungu).
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan organisasi Gerkatin dalam membantu pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (tuna rungu).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua macam yang pertama adalah kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan khazanah wawasan pengetahuan di bidang ilmu politik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan panduan bagi akademisi dan peneliti berikutnya di Prodi Politik Islam, Jurusan Politik Islam, Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan kajian penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain, penting kiranya untuk memaparkan karya ilmiah lain yang juga membantu dalam penelitian yang penulis lakukan tentang Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang). Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Choirun Nisa (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "*Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*". Dalam karya ini menjelaskan tentang hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat disuatu negara. Menurut para ahli hukum hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi (negara), Hak politik adalah hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah negara atau memerintahnya. Pada hakikatnya hak politik dimaksud untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, karena negara sedikit banyak dianggap sebagai ancaman bagi manusia. Untuk melaksanakan hak politik kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundang-undangan dengan menggunakan penelitian *Library Research* dengan pendekatan normatif.¹⁶

Kedua, Jurnal yang dibuat oleh Dian Rachmawati Wasito dan Dwi Sarwindah S, "*Penyesuaian Sosial Remaja Tuna Rungu yang Bersekolah di Sekolah Umum*". Bahwa Tuna

¹⁶Choirun Nisa, "*Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*", Lampung. Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

Rungu ialah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang diakibatkan karena kerusakan atau kehilangan kemampuan mendengar sedangkan remaja tuna rungu adalah seseorang dengan batasan usia antara 12 hingga 21 tahun yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar.¹⁷

Ketiga, Jurnal yang dibuat oleh Eric Hiariej, dkk, “*Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Representasi*” menjelaskan tentang kewarganegaraan yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak-hak kewargaan di wilayah publik di satu sisi, dan proses yang serupa di wilayah privat disisi lainnya, yang berkaitan dengan isu-isu identitas kultural.¹⁸

Keempat, Jurnal yang dibuat oleh Kemendagri yang membahas tentang “*UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*”. Menjelaskan tentang pengertian penyandang disabilitas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan membahas tentang hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.¹⁹

Kelima, Jurnal yang dibuat oleh Kemenkumham yang membahas tentang “*Undang-Undang 1945 tentang Hak Asasi Manusia*”. Menjelaskan tentang isi dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 dan 28 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Mugi Riskiana Halalia (2016) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas*

¹⁷Dian Rachmawati Wasito dan Dwi Sarwindah S, “*Penyesuaian Sosial Remaja Tuna Rungu yang Bersekolah di Sekolah Umum*”, Surabaya. Jurnal (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, 3 Desember 2010).

¹⁸Eric Hiariej, dkk, “*Sejarah Politik Kewargaan Di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Redistribusi Kesejahteraan, dan Politik Representasi*”, Yogyakarta. Jurnal (Yogyakarta: Penerbit PolGov).

¹⁹Kementerian Dalam Negeri, “*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*”, (Jakarta, 11 Mei 2016).

²⁰<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>, diakses Rabu 2 mei 2018 Pukul 20:15.

Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. Yang menjelaskan tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemerintahan. Karena hak politik sebagai salah satu dari rangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas dengan menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²¹

Persamaan penelitian ini adalah fokusnya sama-sama tentang masalah Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas dan menggunakan penelitian deskriptif. Sehingga keenam referensi tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya. Karena sistem pembahasannya hampir sama dengan penulis.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang membahas tentang Penyandang Disabilitas dan menggunakan pendekatan fenomenologi sedangkan penelitian ini memfokuskan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang Periode Tahun 2009-sekarang) menggunakan pendekatan Kualitatif.

Dari tinjauan pustaka di atas secara garis besar bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), sedangkan guna tinjauan

²¹Mugi Riskiana Halalia, “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

pustaka di atas untuk menentukan posisi tulisan dimana dengan penelitian yang sudah ada, konteks pembahasan yang dilakukan oleh para penulis tersebut di atas mempunyai cakupan yang luas mengenai Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas. Maka penelitian yang dilakukan ini memfokuskan pada bidang mengenai “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)”.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor dan variabel yang telah dikenali sebagai masalah yang penting untuk dipecahkan. Sedangkan teori adalah sebuah konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomenal.²² Penelitian ini berjudul “Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)”.

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan, serta untuk memberikan jawaban secara mendalam terhadap permasalahan. Untuk menjawab secara yang ada, maka diperlukan landasan teori. Beberapa teori yang dianggap relevan digunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan. Teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori ilmu politik menurut Miriam Budiardjo dan teori politik kewargaan menurut Kristian Stokke.

Dalam buku Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa menurut John Locke hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and*

²²Fitri Rahhayu, “*Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik*”, Palembang. Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015).

property).²³ Selain itu, menurut Miriam Budiardjo hak politik seperti kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28).²⁴ Pemenuhan berbagai hak politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar.²⁵

Menurut Kristian Stokke konseptualisasi kewargaan yang luas dapat memberikan kerangka lebih menyeluruh untuk mempelajari konstestasi politik terkait atas masalah-masalah budaya, legal dan sosial, dan proses eksklusi dan inklusi. Kristian Stokke berpendapat bahwa gagasan tentang kewargaan menawarkan sebuah basis konseptual untuk memeriksa perjuangan-perjuangan tersebut dengan cara yang lebih menyeluruh: sebagai politik kewargaan.²⁶

Transformasi makna menunjukkan bahwa kewargaan tidak pernah menjadi model yang kekal, tetapi selalu kontekstual dan politisi: bentuk dan substansi kewargaan merupakan hasil dari pertarungan kepentingan, strategi dan kapasitas dalam ruang politik yang beragam. Keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi merupakan elemen umum dalam politik kewargaan, sementara pelebagaan, bentuk-bentuknya melalui ruang-ruang politik dengan pemilahan strategi (*strategic selectivity*) atas beragam agenda, aktor, dan strategi.²⁷

Komponen kewargaan ketiga adalah serangkaian hak yang berhubungan dengan status keanggotaan dan kewargaan formal. Kebebasan sipil pada level individu menjadi prinsip utama untuk mendefinisikan kewargaan berdasarkan pendekatan liberal, namun hak juga dapat tampil dalam bentuk lain. Kategorisasi umum yang diinisiasi oleh Marshall meliputi tiga topologi hak: sipil, politik, dan sosial, antara lain sebagai berikut:

²³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm.111.

²⁴*Ibid*, hlm.249.

²⁵*Ibid*, hlm.251.

²⁶Eric Hiarij dan Kristian Stokke, *Politik Kewargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm.23.

²⁷*Ibid*, hlm.24.

Hak-hak sipil adalah hak yang melindungi keamanan dan privasi individu, termasuk hak untuk mengakses keadilan dan representasi legal, hak membuat kontrak dan memiliki *property* pribadi, dan hak untuk bebas berpikir dan memilih termasuk di dalamnya kebebasan berbicara dan pers, kebebasan beragama, dan bentuk-bentuk kebebasan lainnya yang terkait.

Hak-hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi dalam arena publik dan proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan, dan lain sebagainya.

Hak-hak sosial meliputi hak kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan dan pensiun, hak memiliki kesempatan (khususnya dalam pendidikan dan pasar kerja); dan hak redistributif dan kompensasi, seperti kompensasi bagi pendapatan rendah, pengangguran, dan kecelakaan kerja.²⁸

Kewargaan aktif misalnya, memiliki pengaruh besar pada konstruksi wacana tentang identitas kultural dan partisipasi politik juga menjadi bagian penting pada pelebagaan dan realisasi berbagai bentuk hak kewargaan. Begitu juga hak-hak sosial dan politik dapat digunakan sebagai basis perjuangan bagi prinsip keanggotaan dan status legal yang inklusif. Status formal sebagai seorang warga negara juga membentuk inklusi dan keterkaitan dengan komunitas warga negara. Hal ini berarti bahwa politik kewargaan tidak semestinya dipahami dalam cara yang linear dan berurutan, namun lebih sebagai titik masuk dan pijakan yang kompleks dalam proses-proses politik yang selalu terbuka.²⁹

Menurut Kristian Stokke bahwa politik kewargaan sebagai perjuangan untuk keanggotaan, status legal, hak, dan partisipasi yang substansif dan terlembaga, atau dengan kata

²⁸*Ibid*, hlm.29.

²⁹Eric Hiarej dan Kristian Stokke, *Politik Kewargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm.33.

lain, sebagai perjuangan untuk keadilan kultural, yuridis, sosial, dan politik. Politik kewargaan selalu kompleks dalam hal aktor, kepentingan, strategi, dan kapasitas.³⁰

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, jenis penelitian yang terkait dalam aspek-aspek, yaitu ditinjau dari tujuannya, bidang ilmu, pendekatan, dan tempat penelitian.³¹

- a. Penelitian ditinjau dari segi tujuan, yaitu penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancan, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau di kelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya.³²
- b. Ditinjau dari segi pendekatan, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam arti menggunakan data kualitatif, maka ada tiga aspek pendekatan yaitu: *pendekatan rasional* yaitu mencari makna dari suatu masalah bukan hanya berdasarkan empirik sensual tetapi juga logika, *pendekatan fenomenologi* yaitu menginterpretasikan sebagai subjek dalam memaknai objek-objek disekitarnya, *pendekatan filosofi* yaitu melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode analisis. Dalam hal ini

³⁰ *Ibid*, hlm.40.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.7.

³² Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.207-

peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan *pendekatan fenomenologi* yaitu menginterpretasikan pengalaman manusia sebagai subjek dalam memaknai objek-objek disekitarnya.³³

- c. Ditinjau dari segi ilmu, setiap bidang ilmu pengembangan melalui aktivitas penelitian setiap bidang ilmu memerlukan pengembangan melalui aktivitas penelitian, baik dari banyaknya ragam ataupun bidangnya. Dalam riset ini berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)” maka masuk dalam bidang Ilmu Sosial Objek penelitian ilmu sosial adalah manusia dan fenomena sosial, dalam hal ini penelitian akan meningkatkan tentang “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pendidikan Politik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)”.
- d. Ditinjau dari segi tempat penelitian, meliputi di lapangan (*field research*), penelitian di perpustakaan (*library research*), dan penelitian di laboratorium (*laboratory research*). Penelitian di lapangan (*field research*), penulis terjun langsung ke lapangan atau dilakukan di kantor organisasi Gerkatin yang bertempat di Jalan Mangkunegara Palembang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang akurat. Selain itu penelitian lapangan, peneliti harus masuk ke dalam objeknya, artinya peneliti sendiri yang harus memperhatikan hubungan antar objek dan dirinya sendiri. Penelitian perpustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan

³³Witri Rosila, “Peran Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 201-2016”, Palembang. Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), hlm.23.

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Penelitian di laboratorium (*laboratory research*) adalah penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu atau laboratorium, biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Dalam penelitian di laboratorium dan perpustakaan peneliti berada tetap di luar objeknya, artinya dirinya sendiri tidak ada hubungan dengan objek yang ditelitinya itu.³⁴ Jika ditinjau dari tempat penelitian, penelitian ini adalah penelitian di lapangan, karena data yang diperlukan diperoleh di lapangan, karena itu peneliti harus menunggu terjadinya gejala yang menjadi objek observasinya itu.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.³⁵ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah latar belakang Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang).

Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan, maka akan digunakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dimana dari hasil peneliti tersebut akan menghasilkan data-data yang secara deskriptif tertulis dari pada penuturan,

³⁴Witri Rosila, “Peran Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Provinsi Sumatera Selatan Periode 201-2016”, Palembang. Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), hlm.24.

³⁵Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal.3.

tindakan, praktik atau perilaku yang diamati secara langsung.³⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan apa yang sebenarnya terjadi.

b. Sumber Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber data dalam usaha memperoleh data mengenai subjek terkait secara langsung. Sumber Data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1). Data Primer

Data Primer merupakan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer merupakan data asli. Untuk memperoleh data primer ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan. Informan adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

2). Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya data yang diperoleh dari hasil dokumen, skripsi, buku, jurnal dan laporan-laporan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian.

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Di Kota Palembang).

³⁶Mugi Riskiana Halalia, “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*”, Yogyakarta. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan (Observasi) yang dilakukan untuk mengungkap dan memperoleh deskripsi secara utuh dan sistematis tentang pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) di Kota Palembang. Dikarenakan objek kajian berada dalam kurun waktu yang lampau maka proses observasi mengarah pada melihat relevansi antara data-data yang didapatkan dengan fakta dan kondisi aktual sekarang.
- b. Wawancara (Interview) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara dilakukan secara lebih terbuka dan mendalam. Maksud dari wawancara ini adalah dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatan) di Kota Palembang. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali lebih jauh data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi.
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik berbentuk tulisan, gambar, maupun dokumen atau foto-foto kegiatan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara ataupun observasi dalam penelitian kualitatif. Sehingga data tersebut dapat membantu dalam memecahkan suatu permasalahan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang telah terdokumentasikan dari data primer dan data sekunder yang telah disebutkan diatas sebagai sarana untuk mendapatkan data yang valid.
- d. Lokasi Penelitian dilakukan di kantor Gerkatan Jalan MP Mangkunegara sebagai pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena penelitian ini ingin fokus pada

“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang)”.

J. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan oleh peneliti berdasarkan teknik pengumpulan data tertentu di dapat data mentah, data tersebut kemudian diolah. Teknik analisis data merupakan sebuah proses pengolahan data dengan menyederhanakan data ke dalam bentuk lain dengan tujuan agar data-data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, dan jelas mengenai problem yang diteliti dengan hasilnya agar dapat diujikan kebenarannya.³⁷ Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.³⁸

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data lapangan model Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif digunakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas. Langkah-langkah analisa data Model Miles dan Huberman, yaitu:

a. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan selanjutnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan

³⁷Mugi Riskiana Halalia, Skripsi berjudul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hlm.24.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.35.

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³⁹

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

c. Manipulasi Data

Manipulasi Data yaitu bentuk analisis yang mengubah atau menyederhanakan data setelah data digolongkan dan dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, yang kemudian, dilakukan manipulasi data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena, sehingga data-data mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasi.⁴⁰

d. Conclusion Drawing/Verifaction (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

³⁹*Ibid*, hlm.245-247.

⁴⁰Mei Wisnu, Skripsi berjudul “*Relasi Kuasa Antara Kiai di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ogan Ilir Sumatera Selatan*”, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), hlm.41.

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berubah deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴¹

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam V BAB, dan memiliki beberapa sub bab dan sub pembahasan dalam setiap babnya. Adapun rincian dalam pembahasannya sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, merupakan pendahuluan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini. Secara rinci dalam bab pertama ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II DESKRIPSI ORGANISASI GERKATIN KOTA PALEMBANG, akan membahas mengenai profil organisasi Gerkatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia) di Kota Palembang yang merupakan tempat yang akan dijadikan subjek oleh peneliti di Kota Palembang meliputi sejarah berdirinya organisasai Gerkatin di Kota Palembang, lahirnya pendiri organisasi gerkatin, visi dan misi, tujuan organisasi Gerkatin, tugas pokok organisasi Gerkatin, Usaha organisasi Gerkatin, dan struktur organisasi Gerkatin.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.246.

Bab III HAK POLITIK KAUM DISABILITAS DI GERKATIN KOTA PALEMBANG, bab ini merupakan bab analisis data tentang persoalan pokok yang dikaji yaitu pemenuhan hak politik Bagi penyandang disabilitas (Studi Kasus Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia di Kota Palembang), kendala apa yang menghambat penyandang disabilitas mendapatkan haknya terutama hak politik, dan apa upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Bab IV PENUTUP, bab ini berisikan tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan saran dari penyusun.